

## BAB II

### DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

#### A. Profil Geografis Kota Pekalongan

Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut dengan posisi geografis antara 6 50' 42" s.d. 6 55' 44" Lintang Selatan dan 109 37' 55" s.d. 109 42' 19" Bujur Timur serta dengan koordinat fiktif 510.00 – 518.00 Km membujur dan 517.75 – 526.75 Km melintang.

Batas wilayah secara administratif tertuang pada aturan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang, yang terdiri dari :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Batang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang
- Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan

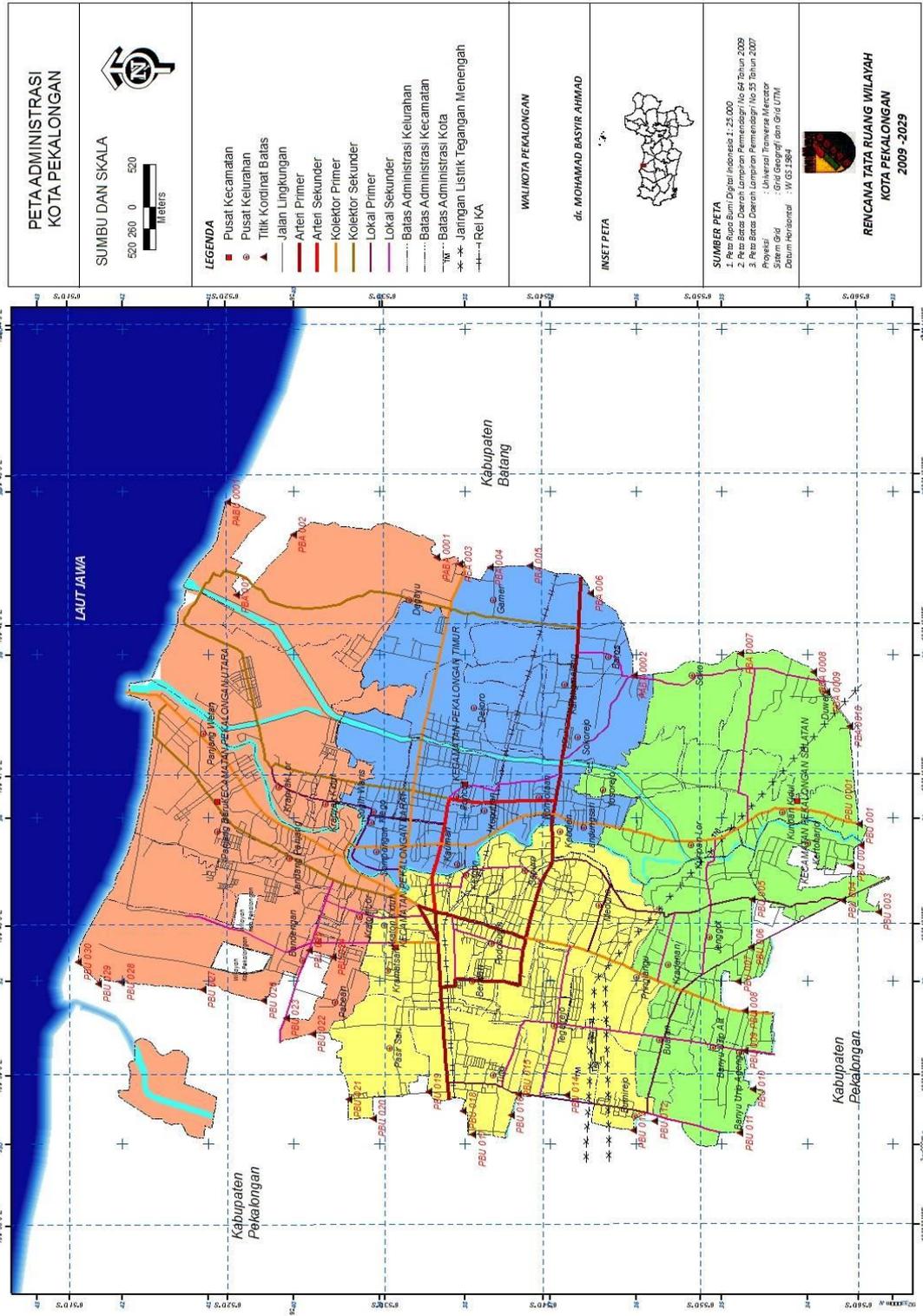
Secara keseluruhan luas Kota Pekalongan adalah 45,25 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari beberapa wilayah kecamatan dengan persentase luas sebagai berikut :

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Pekalongan Menurut Kecamatan

<b>Kecamatan</b>	<b>Luas Kecamatan (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase Terhadap Luas (%)</b>
Pekalongan Barat	10,05	22,21
Pekalongan Timur	9,52	21,04
Pekalongan Selatan	10,80	23,87
Pekalongan Utara	14,88	32,88
<b>Kota Pekalongan</b>	<b>45,25</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2014

Gambar 2.1. Peta Administratif Kota Pekalongan



## B. Profil Penduduk Kota Pekalongan

Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2013 adalah 290.870 jiwa, terdiri dari 145.450 laki-laki (50,01%) dan 145.420 perempuan (49,99%) dengan persebaran per kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Kota Pekalongan menurut Kecamatan

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pekalongan Barat	45.679	45.627	91.306
Pekalongan Timur	31.816	32.099	63.915
Pekalongan Selatan	29.232	28.626	57.858
Pekalongan Utara	38.723	39.068	77.791
<b>Jumlah</b>	<b>145.450</b>	<b>145.420</b>	<b>290.870</b>

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2014

Kepadatan penduduk di Kota Pekalongan cenderung mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya. Sedangkan rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kota Pekalongan cukup kecil, hal ini disebabkan karena jumlah penduduk usia 15-64 tahun yang berjumlah 201.323 jiwa, lebih besar dari penduduk usia 0-14 tahun dan 56 tahun keatas yang berjumlah 89.547 jiwa.

Tabel 2.3. Kepadatan Pendudukan, Sex Ratio, dan Rasio Ketergantungan Kota Pekalongan Tahun 2013

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	Sex Ratio	Dependency Ratio
Pekalongan Barat	9.085	100,11	43,82
Pekalongan Timur	6.714	99,11	43,43
Pekalongan Selatan	5.357	102,11	46,13
Pekalongan Utara	5.227	99,11	44,83
Kota Pekalongan	6.428	100,02	44,48

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2014

Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014, KPU Kota Pekalongan telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 215.200 orang untuk Pileg 2014 dan 217.464 orang untuk Pilpres 2014.

Tabel 2.4. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Kecamatan Pada Penyelenggaraan Pileg 2014 dan Pilpres 2014 di Kota Pekalongan

Kecamatan	Jumlah DPT (Orang)	
	Pileg 2014	Pilpres 2014
Pekalongan Barat	67.291	67.955
Pekalongan Timur	48.957	49.355
Pekalongan Selatan	42.197	42.786
Pekalongan Utara	56.755	57.368
<b>JUMLAH</b>	<b>215.200</b>	<b>217.464</b>

Sumber : KPU Kota Pekalongan

Tabel 2.5. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Jenis Kelamin Pada Penyelenggaraan Pileg 2014 dan Pilpres 2014 di Kota Pekalongan

Jenis Kelamin	Jumlah DPT (Orang)	
	Pileg 2014	Pilpres 2014
Laki-Laki	<b>107.360</b>	108.362
Perempuan	<b>107.840</b>	109.102
<b>JUMLAH</b>	<b>215.200</b>	<b>217.464</b>

Sumber : KPU Kota Pekalongan

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pekalongan pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang dilaksanakan pada 9 April 2014 sejumlah 215.200 jiwa. Sedangkan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, DPT Kota Pekalongan mengalami kenaikan yaitu menjadi 217.464 jiwa.

Sedangkan untuk jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disediakan di Kota Pekalongan pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten Tahun 2014 ada 564 TPS.

Tabel 2.6. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Kelurahan pada Pemilu Legislatif Tahun 2014

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah TPS	DPT Lk	DPT Pr	Jumlah
1	Pekalongan Barat	Kebulen	10	2.040	1.999	4.039
		Medono	28	5.237	5.251	10.488
		Podosugih	19	3.494	3.615	7.109
		Sapuro	11	2.247	2.189	4.436
		Kergon	13	2.435	2.453	4.888
		Bendan	16	2.829	3.001	5.830
		Kramatsari	11	2.154	2.182	4.336
		Kraton Kidul	4	668	756	1.424
		Tirto	18	3.641	3.649	7.290
		Tegalrejo	14	2.579	2.780	5.359
		Bumirejo	4	800	822	1.622
		Pringlangu	12	2.305	2.349	4.654
		Pasir Sari	15	2.906	2.910	5.816
<b>JUMLAH</b>			<b>175</b>	<b>33.335</b>	<b>33.956</b>	<b>67.291</b>
2	Pekalongan Timur	Langdungsari	13	2.535	2.536	5.061
		Noyontaan	13	2.285	2.344	4.629
		Keputran	8	1.379	1.484	2.863
		Kauman	4	754	787	1.541
		Sampangan	7	1.207	1.285	2.492
		Sugihwaras	6	1.089	1.140	2.229
		Poncol	24	4.253	4.388	8.641
		Klego	17	3.139	3.253	6.392
		Gamer	8	1.486	1.528	3.014
		Dekoro	14	2.849	2.735	5.584
		Karangmalang	5	900	991	1.891
		Baros	5	1.023	1.014	2.037
		Sokorejo	6	1.296	1.287	2.583
<b>JUMLAH</b>			<b>130</b>	<b>24.195</b>	<b>24.762</b>	<b>48.957</b>
3	Pekalongan Utara	Krapyak Kidul	11	2.112	2.060	4.172
		Krapyak Lor	22	4.249	4.156	8.405
		Kandang Panjang	24	4.572	4.846	9.418
		Panjang Wetan	25	5.566	4.473	10.039
		Kraton Lor	9	1.466	1.700	3.166
		Dukuh	8	1.175	1.368	2.543
		Degayu	13	2.517	2.466	4.983
		Pabean	8	1.704	1.699	3.403
		Bandengan	11	2.082	2.049	4.131
		Panjang Baru	17	3.243	3.252	6.495
<b>JUMLAH</b>			<b>148</b>	<b>28.686</b>	<b>28.069</b>	<b>56.755</b>

4	Pekalongan Selatan	Kradenan	15	2.860	2.886	5.746
		Banyurip Alit	10	1.817	1.855	3.672
		Buaran	7	1.242	1.254	2.495
		Jenggot	22	4.293	4.157	8.450
		Kertoharjo	6	1.199	1.194	2.393
		Kuripan Kidul	7	1.257	1.312	2.569
		Kuripan Lor	11	2.115	2.091	4.206
		Yosorejo	10	2.000	1.914	3.914
		Duwet	7	1.370	1.349	2.719
		Soko	5	1.012	1.036	2.048
		Banyurip Ageng	11	1.980	2.005	3.985
<b>JUMLAH</b>			<b>111</b>	<b>21.144</b>	<b>21.053</b>	<b>42.197</b>
<b>JUMLAH se-Kota Pekalongan</b>			<b>564</b>	<b>107.360</b>	<b>107.840</b>	<b>215.200</b>

Sumber : KPU Kota Pekalongan

### C. Profil Pemerintahan Kota Pekalongan

#### C.1 Pemerintah Kota Pekalongan

Secara yuridis formal, Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomer 16 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Jawa Barat/Jawa Tengah/Jawa Timur dan Daerah Istimewa Jogjakarta. Selanjutnya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, maka Pekalongan berubah sebutannya menjadi Kotamadya Dati II Pekalongan.

Terbitnya PP Nomor 21 Tahun 1988 tanggal 5 Desember 1988 dan ditinjaulanjuti dengan Inmendagri Nomor 3 Tahun 1989 merubah batas wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan sehingga luas wilayahnya berubah dari 1.755 Ha menjadi 4.465,24 Ha dan terdiri dari 4 Kecamatan, 22 desa dan 24 kelurahan. Sejalan dengan era reformasi yang menuntut adanya reformasi disegala bidang, diterbitkan PP Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 32 Tahun 2004 yang mengubah sebutan Kotamadya Dati II Pekalongan menjadi Kota Pekalongan.

Tabel 2.7. Jumlah Kelurahan, RW dan RT menurut Kecamatan di Kota Pekalongan Tahun 2014

<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>RT</b>	<b>RW</b>
Pekalongan Barat	13	101	486
Pekalongan Timur	13	84	407
Pekalongan Selatan	11	66	256
Pekalongan Utara	10	82	420
<b>JUMLAH</b>	<b>47</b>	<b>333</b>	<b>1.569</b>

*Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan*

Dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 telah membentuk perangkat daerah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Staf Ahli ;
- c. Sekretariat DPRD;
- d. Sekretariat KPU;
- e. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari;
  - Inspektorat;
  - d.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - d.2 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
  - d.3 Badan Kepegawaian Daerah;
  - d.4 Kantor Lingkungan Hidup;
  - d.5 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d.6 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
  - d.7 Kantor Ketahanan Pangan;
  - d.8 Rumah Sakit Umum Daerah.

- f. Dinas Daerah, yang terdiri dari;
  - e.1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
  - e.2 Dinas Kesehatan;
  - e.3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - e.4 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - e.5 Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan;
  - e.6 Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - e.7 Dinas Pekerjaan Umum;
  - e.8 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - e.9 Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan;
  - e.10 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- g. Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari;
  - f.1 Kecamatan Pekalongan Barat, terdiri dari :
    - 1) Kelurahan Kebulen;
    - 2) Kelurahan Medono;
    - 3) Kelurahan Podosugih;
    - 4) Kelurahan Sapuro;
    - 5) Kelurahan Kergon;
    - 6) Kelurahan Bendan;
    - 7) Kelurahan Kramatsari;
    - 8) Kelurahan Kraton Kidul;
    - 9) Kelurahan Tirto;
    - 10) Kelurahan Tegalrejo;
    - 11) Kelurahan Bumirejo;
    - 12) Kelurahan Pringlangu;
    - 13) Kelurahan Pasirsari.
  - f.2 Kecamatan Pekalongan Timur, terdiri dari :
    - 1) Kelurahan Landungsari;
    - 2) Kelurahan Noyontaan;
    - 3) Kelurahan Keputran;

- 4) Kelurahan Kauman
- 5) Kelurahan Sampangan;
- 6) Kelurahan Sugihwaras;
- 7) Kelurahan Poncol;
- 8) Kelurahan Klego;
- 9) Kelurahan Gamer;
- 10) Kelurahan Dekoro;
- 11) Kelurahan Karangmalang;
- 12) Kelurahan Baros;
- 13) Kelurahan Sokorejo.

f.3 Kecamatan Pekalongan Utara, terdiri dari :

- 1) Kelurahan Krapyak Kidul;
- 2) Kelurahan Krapyak Lor;
- 3) Kelurahan Kandang Panjang;
- 4) Kelurahan Panjang Wetan;
- 5) Kelurahan Kraton Lor;
- 6) Kelurahan Dukuh;
- 7) Kelurahan Degayu;
- 8) Kelurahan Pabean;
- 9) Kelurahan Bandengan;
- 10) Kelurahan Panjang Baru;

f.4 Kecamatan Pekalongan Selatan, terdiri dari :

- 1) Kelurahan Kradenan;
- 2) Kelurahan Banyurip Alit;
- 3) Kelurahan Buaran;
- 4) Kelurahan Jenggot;
- 5) Kelurahan Kertoharjo;
- 6) Kelurahan Kuripan Kidul;
- 7) Kelurahan Kuripan Lor;
- 8) Kelurahan Yosorejo;
- 9) Kelurahan Duwet;

- 10) Kelurahan Soko;
- 11) Kelurahan Banyurip Ageng.
- h. Satpol PP dan Lembaga Lain;
  - g.1 Satpol PP;
  - g.2 BPMP2T.

## C.2 Profil Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan

Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Periode 2010-2015 hasil Pemilukada Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

**Walikota** : **dr. Mohammad Basyir Ahmad**  
Pekerjaan Dokter, beralamat di Jalan H. Agus Salim Nomor 67, RT. 007/RW. 004, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.

**Wakil Walikota** : **H. Achmad Alf Arslan Djunaid, S.E.**  
Pekerjaan Swasta, beralamat di Pesindon Gang 1, Nomor 33, RT. 005/RW. 002, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.

Walikota dan Wakil Walikota Periode 2010-2015 memperoleh suara sebanyak 73,963 atau 53,08% dari 139,332 suara sah di Kota Pekalongan yang diusung oleh koalisi dari Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

## C.3 Profil DPRD Kota Pekalongan

Jumlah kursi di DPRD Kota Pekalongan sebanyak 30 kursi untuk periode 2014-2019. Anggota DPRD Kota Pekalongan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 telah dilantik pada 14 Agustus 2014 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pekalongan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan. Pelantikan tersebut ditetapkan dalam

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/62 Tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kota Pekalongan.

Perolehan suara sah partai politik dalam pemilu anggota DPRD Kota Pekalongan Tahun 2014 sebanyak 165.128. Perolehan tersebut menjadikan dasar dalam pembagian perolehan kursi DPRD Kota Pekalongan sebagai berikut :

Tabel 2.8. Perolehan Suara Partai Politik dan Jumlah Kursi dalam Pemilu Legislatif DPRD Kota Pekalongan Tahun 2014

<b>NO.</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>	<b>JUMLAH KURSI</b>
1	Partai NasDem	5.487	-
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	20.146	3
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	17.181	3
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	23.378	4
5	Partai Golongan Karya (Golkar)	42.152	9
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	11.595	3
7	Partai Demokrat	7.060	1
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	13.017	3
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	19.105	4
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.123	-
14	Partai Bulan Bintang (PBB)	3.751	-
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	133	-
<b>JUMLAH</b>		<b>165.128</b>	<b>30</b>

Sumber : KPU Kota Pekalongan

Adapun pembagian tugas anggota DPRD Kota Pekalongan periode 2014-2019 dalam melaksanakan kewenangan DPRD Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

**Pimpinan DPRD Kota Pekalongan Periode 2014-2019**

- Ketua : Hj. Balgis Diab, S.Ag., SE., MM. P. Golkar
- Wakil Ketua : Abdul Rozak, S.IP. PPP
- Wakil Ketua : Ismet Inonu, SH., MH. PDI-P

**Komisi A**

- Ketua : Aji Suryo, A.Md. PKS
- Wakil Ketua : H. Rizqon, S.IP. PAN
- Sekretaris : Edy Supriyanto PDI-P
- Anggota : H. Sugeng Indiarso, SH. P. Golkar
- Anggota : Desy Tria Amira Fasa, A.Md. P. Golkar
- Anggota : Nur Fahoni PPP
- Anggota : H. Freddy Wijaya, SM.Hk. PAN
- Anggota : Drs. H.M. Fatoni PKB
- Anggota : Mira Yuningsih, SE. P. Gerindra

**Komisi B**

- Ketua : H. Mabror, SH. PPP
- Wakil Ketua : Gumelar PDI-P
- Sekretaris : Jacky Zamzami PKB
- Anggota : Mofid, SH. P. Golkar
- Anggota : H. Budi Setiawan, SE. P. Golkar
- Anggota : Fauzi Umar Lahji, SE. P. Golkar
- Anggota : Arya Bima, SH. P. Demokrat
- Anggota : Mungzilin, SHI. PKS
- Anggota : Riana Setyawati, SH. P. Gerindra

**Komisi C**

- Ketua : H. Sudjaka Martana, S.IP. P. Golkar
- Wakil Ketua : H. Ribut Kalimantanoro P. Gerindra
- Sekretaris : Drs. Nurhadi PPP

- Anggota	: H. M. Nofel, SE., ST., M.Si.	P. Golkar
- Anggota	: Novi Esti Farhati, Sf Apt.	P. Golkar
- Anggota	: Karya Budiman	PDI-P
- Anggota	: Makmur S. Mustofa, A.Ma.	PAN
- Anggota	: Nusron, S.Ag.	PKB
- Anggota	: Idris Satria Budi, AK.MBA.	PKS

#### C.4 Kondisi Politik Kota Pekalongan

Konsider politik dimulai pada tahun 2004 telah menunjukkan bahwa telah terjadi pendewasaan politik yang makin baik dari warga masyarakat. Berbagai kekhawatiran yang banyak dikemukakan ternyata tidak terjadi, sehingga suasana sosial politik ditengah-tengah masyarakat dapat tetap kondusif. Ini sekaligus menunjukkan bahwa proses demokratisasi telah berjalan pada arah dan jalur yang benar. Seringnya pelaksanaan pemilu sebagai salah satu alat demokrasi makin mendewasakan wawasan berpolitik warga Pekalongan. Perbedaan aspirasi politik bukan lagi menjadi faktor yang mengakibatkan perpecahan dikalangan warga masyarakat.

Salah satu perkembangan terpenting dalam demokrasi adalah keberhasilan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dalam hal ini pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan. Pilkada langsung merupakan salah satu cermin adanya jaminan dan penghormatan terhadap hak politik warga negara. Pilkada Kota Pekalongan tahun 2005 merupakan salah satu pelaksanaan pilkada langsung pertama di Indonesia dimana melibatkan penduduk yang tercatat sebagai pemilih sebanyak 96.695 orang pemilih wanita dan 93.435 orang pemilih pria.

Tabel 2.9. Perolehan Suara Partai Politik dalam  
Pemilu Legislatif DPRD Kota Pekalongan Tahun 2009 dan 2014

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA	
		2009	2014
1	Partai NasDem	-	5.487
2	Partai Kebangkitan Bangsa	15.400	20.146
3	Partai Keadilan Sejahtera	6.307	17.181
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19.020	23.378
5	Partai Golongan Karya	35.542	42.152
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.822	11.595
7	Partai Demokrat	5.901	7.060
8	Partai Amanat Nasional	20.694	13.017
9	Partai Persatuan Pembangunan	14.427	19.105
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3.242	2.123
14	Partai Bulan Bintang	1.815	3.751
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	174	133
16	Partai Karya Peduli Bangsa	360	-
17	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.021	-
18	Partai Barisan Nasional	101	-
19	Partai Kedaulatan	14	-
20	Partai Persatuan Daerah	100	-
21	Partai Pemuda Indonesia	123	-
22	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	100	-
23	Partai Demokrasi Pembaruan	1.276	-
24	Partai Karya Pembaruan	207	-
25	Partai Matahari Bangsa	320	-
26	Partai Demokrasi Kebangsaan	1.005	-
27	Partai Republik Nusantara	176	-
28	Partai Pelopor	73	-
29	Partai Bintang Reformasi	64	-
30	Partai Indonesia Sejahtera	276	-
31	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	5.564	-
JUMLAH		138.201	165.128

Sumber : KPU Kota Pekalongan

Kota Pekalongan sebagai kota yang bernuansa religus, diawal pelaksanaan pemilu tahun 2009 suara mayoritas masih tersebar di partai politik yang bernuansa religius, yaitu Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun suasana orde lama masih terbawa di Kota Pekalongan, hal ini dimana Partai Golongan Karya

(Partai Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masih menempati suara terbanyak. Hal inipun terlihat dari kepemilikan sekretariat tetap yang berbasis massa Partai Golkar dan PDI-P.

Basis Partai Golkarpun masih menguasai pemilih di Kota Pekalongan, hal ini terlihat dari perolehan suara dengan kemenangan signifikan bagi koalisi Partai Golkar pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2005 dan Tahun 2010.

Tabel 2.10. Perolehan Suara Koalisi Partai Politik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2005 dan 2010

No.	Koalisi Partai Politik	Pasangan Calon	Perolehan Suara
<b>Tahun 2005</b>			
1	- PDIP - PAN	Drs Sigit Sumarhaen, SH. & HM. Freddy Wijaya SmHk.	26.556 (22,22%)
2	- Partai Golkar - PKNU	dr. Mohamad Basyir & H. Abu Almafachir	51.934 (43,45%)
3	- PKB	Drs. Anthony & Drs. Hasyim Fahmi	13.141 (10,99%)
4	- PPP	Drs. Timur Susila & Urip Sunarjo, SH., MM.	27.894 (23,34%)
<b>JUMLAH SUARA SAH</b>			119.525 (100%)
<b>Tahun 2010</b>			
1	- Partai Golkar - PKS	dr. H.M. Basyir Ahmad & H.A. Alf Arslan Djunaid, SE.	73.963 (53,08%)
2	- PDI Perjuangan - PPP - PKB - PAN - Partai Gerindra - Partai Demokrat - PKNU	H. Abu Almafachir & H. Masrof, SH.	56.854 (40,80%)
3	Independen (Perorangan)	Supriyadi, SH. M.Pd. & Drs. H. Abd. Kholiq	8.515 (6,11%)
<b>JUMLAH SUARA SAH</b>			139.332 (100%)

Sumber : KPU Kota Pekalongan

## **D. Profil Partai Gerindra**

### **1. Partai Gerindra**

#### **1.1. Sejarah Partai Gerindra**

Bermula dari keprihatinan, Partai Gerindra lahir untuk mengangkat rakyat dari jerat kemelaratan, akibat permainan orang-orang yang tidak peduli pada kesejahteraan. Dalam sebuah perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, terjadi obrolan antara intelektual muda Fadli Zon dan pengusaha Hashim Djojohadikusumo. Ketika itu, November 2007, keduanya membahas politik terkini yang jauh dari nilai-nilai demokrasi sesungguhnya. Demokrasi sudah dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kapital besar. Akibatnya, rakyat hanya jadi alat. Bahkan, siapapun yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi dan politik akan dengan mudah jadi korban. Bila keadaan ini dibiarkan, negara hanya akan diperintah oleh para mafia. Fadli Zon lalu mengutip kata-kata politisi Inggris abad kedelapan belas, Edmund Burke: *“The only thing necessary for the triumph [of evil] is for good men to do nothing.”* Dalam terjemahan bebasnya, “kalau orang baik-baik tidak berbuat apa-apa, maka para penjahat yang akan bertindak.” terinspirasi oleh kata-kata tersebut, Hashim pun setuju bila ada sebuah partai baru yang memberikan haluan baru dan harapan baru. Tujuannya tidak lain, agar negara ini bisa diperintah oleh manusia yang memerhatikan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan golongannya saja. Sementara kondisi yang sedang berjalan, justru memaksakan demokrasi di tengah himpitan kemiskinan, yang hanya berujung pada kekacauan.

Setelah perdebatan cukup panjang dan alot, akhirnya disepakati perlu ada partai baru yang benar-benar memiliki manifesto perjuangan demi kesejahteraan rakyat. Untuk mematangkan konsep partai, pada Desember 2007, di sebuah rumah, yang menjadi markas IPS (*Institute for Policy Studies*) di Bendungan

Hilir, berkumpul sejumlah nama. Selain Fadli Zon, hadir pula Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi dan Haris Bobihoe. Mereka membicarakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang akan dibentuk. Karena padatnya jadwal pembuatan AD/ART, akhirnya fisik Fadli ambruk juga. Lelaki yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif di IPS ini harus dirawat di rumah sakit selama dua minggu.

Fadli tidak tahu lagi bagaimana kelanjutan partai baru ini. Bahkan dia merasa pesimistis bahwa gagasan pembentukan partai baru itu akan terus berlanjut. Namun diluar dugaan, ketika Hashim datang menjenguk di rumah sakit, Hashim tetap antusias pada gagasan awal untuk mendirikan partai politik. Akhirnya, pembentukan partai pun terus dilakukan secara maraton. Hingga akhirnya, nama Gerindra muncul, diciptakan oleh Hashim sendiri. Sedangkan lambang kepala burung garuda digagas oleh Prabowo Subianto.

Pembentukan Partai Gerindra terbilang mendesak. Sebab dideklarasikan berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa kampanye pemilihan umum, yakni pada 6 Februari 2008. Dalam deklarasi itu, termaktub visi, misi dan manifesto perjuangan partai, yakni terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945.

Bahwa cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan cita-cita bersama seluruh rakyat Indonesia.

Cita-cita kemerdekaan tersebut hanya dapat dicapai dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, membangun segala kehidupan secara seimbang baik lahir dan batin dengan landasan Pancasila. Selanjutnya kehidupan bangsa yang lebih maju, modern dan mandiri menuntut pembaharuan yang terus menerus melalui usaha-usaha yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan zaman dengan tetap memelihara nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia.

Para pendiri Partai Gerindra menyadari bahwa telah terjadi penyelewengan-penyelewengan terhadap cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga melahirkan kondisi bangsa yang memperlebar jurang antara kaum miskin dan kaya. Penguasaan kekuatan ekonomi terhadap sumber-sumber kekayaan alam yang tidak berpihak kepada kepentingan nasional bangsa Indonesia membuat bangsa Indonesia semakin tergantung pada pihak luar yang pada ujungnya membuat bangsa Indonesia kehilangan kedaulatan dan kemerdekaan sejati. Kondisi tersebut menuntut seluruh kehidupan bangsa dilandaskan kepada kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikumandangkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian hakikat tatanan baru adalah sikap mental yang menuntut pembaharuan dan pembangunan yang terus menerus dalam rangka melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada tanggal 28 Agustus 2014, Prof. Dr. Ir. Suhardi, S.S., M.Sc. selaku Ketua Umum Partai Gerindra meninggal dunia. Guna tetap berjalannya organisasi, Partai Gerindra melakukan Kongres Luar Biasa yang menetapkan Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dinyatakan dengan Akta Pernyataan Ketetapan Kongres Luar Biasa Partai Gerindra No.73 tertanggal 25 September 2014. Sehingga Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, nomor: M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2014 mengesahkan Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Keputusan ini mulai berlaku sejak 8 Oktober 2014. Rencana pelaksanaan kongres Partai Gerindra sebagai bentuk musyawarah tertinggi partai akan dilaksanakan pada 2015.

## 1.2. Jati Diri Partai Gerindra

Partai Gerindra berpijak dan berpegang teguh pada landasan kedaulatan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun jati diri Partai Gerindra adalah :

- Kebangsaan (nasionalisme), Partai Gerindra adalah partai yang berwawasan kebangsaan yang berpegang teguh pada karakter nasionalisme yang kuat, tangguh, dan mandiri. Wawasan kebangsaan ini menjadi jiwa dalam segala aspek kehidupan berbangsa, baik kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keagamaan.
- Kerakyatan, Partai Gerindra adalah partai yang dibentuk dari, oleh, dan untuk rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sah atas Republik Indonesia. Keberpihakan pada kepentingan rakyat merupakan sebuah keniscayaan.
- Religius, Partai Gerindra adalah partai yang memegang teguh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Nilai-nilai religius senantiasa menjadi landasan bagi setiap jajaran pengurus, anggota, dan kader Partai Gerindra dalam bersikap dan bertindak.
- Keadilan Sosial, Partai Gerindra adalah partai yang mencita-citakan suatu tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial, yakni masyarakat yang adil secara ekonomi, politik, hukum,

pendidikan, dan kesetaraan gender. Keadilan sosial harus didasari atas persamaan hak, pemerataan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

### 1.3. Visi dan Misi Partai Gerindra

Keberadaan Partai Gerindra dalam pentas politik nasional memiliki visi "menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia." Untuk mewujudkan visi tersebut, Partai Gerindra mengemban misi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain :

- Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan mengurangi ketergantungan kepada pihak asing.
- Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
- Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan praduga tak bersalah dan persamaan hak di depan hukum.
- Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat.

### 1.4. Prinsip Dasar Partai Gerindra

Dalam mewujudkan visi dan misi, Partai Gerindra mengacu pada prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

- Prinsip Disiplin  
Disiplin merupakan prinsip dasar dari seluruh perjuangan Partai Gerindra dalam mencapai tujuan bersama. Dengan disiplin,

seluruh sumber daya terfokus dan terorganisir sehingga mencapai usaha maksimal. Dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, Partai Gerindra senantiasa mengedepankan disiplin dalam setiap gerak dan langkah.

- Prinsip Kedaulatan

Kedaulatan merupakan perwujudan sejati dari sebuah kemerdekaan, yang meliputi kedaulatan atas diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Menghargai dan menghormati kedaulatan setiap entitas merupakan landasan penting dalam tata pergaulan sosial, politik, dan ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai Gerindra bersikap dan bertindak berdasarkan penghormatan dan penghargaan terhadap kedaulatan setiap individu serta menjaga dan mempertahankan kedaulatan bangsa.

- Prinsip Kemandirian

Kemandirian dimaknai sebagai bekerja dan berkarya berdasarkan kemampuan diri sendiri dan tidak menggantungkan diri pada bantuan pihak lain. Kemandirian juga dimaknai sebagai manifestasi dari kepercayaan diri dan penghargaan atas diri sendiri serta menempatkan setiap individu sebagai entitas yang memiliki kemampuan dan karya. Partai Gerindra bersikap dan bertindak berdasarkan kemampuan yang dimiliki serta menghargai kemandirian setiap individu.

- Prinsip Persamaan Hak

Dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap individu memiliki persamaan hak yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku. Tak ada yang dikecualikan dan dibedakan haknya, kecuali dikarenakan oleh karya dan kerja individu itu sendiri. Partai Gerindra bersikap dan bertindak dengan mengedepankan persamaan hak setiap individu dan mengembangkan sikap anti diskriminasi.

- Prinsip Kerjasama dan Gotong Royong

Sikap kerjasama dan gotong royong yang dilandasi oleh penghormatan atas kedaulatan, kemandirian, dan persamaan hak dalam mengerjakan dan menuntaskan sebuah pekerjaan sejatinya merupakan kebutuhan setiap manusia sebagai makhluk sosial. Tidak ada individu yang bisa hidup tanpa membutuhkan individu lain. Partai Gerindra sangat menyadari pentingnya kerjasama, karena itu dalam setiap sikap dan tindakan, Partai Gerindra mengedepankan dan mengembangkan kerjasama dan gotong royong dengan entitas masyarakat lainnya sebagai landasan pergaulan berbangsa dan bernegara.

- Prinsip Musyawarah

Musyawarah merupakan ciri khas budaya bangsa Indonesia yang luhur. Musyawarah memberikan penghormatan kedaulatan individu dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Musyawarah harus dijadikan jalan utama dalam memecahkan setiap permasalahan sehingga tidak memunculkan konflik dan kebuntuan. Partai Gerindra menjadi garda terdepan dalam pelestarian nilai-nilai musyawarah dengan mengembangkan musyawarah dalam penyelesaian permasalahan bangsa.

### 1.5. Lambang Partai Gerindra



#### KETERANGAN

- ✓ Kotak persegi panjang bergaris hitam, dasar warna putih, yang melambangkan kesucian dan keikhlasan. Di tengah terdapat lima persegi bergaris hitam dengan dasar merah.
- ✓ Di tengahnya terdapat gambar kepala Burung Garuda dengan warna kuning keemasan, melambangkan kemakmuran.
- ✓ Menghadap ke kanan, melambangkan keberanian dalam bersikap dan bertindak.
- ✓ Kepala Burung Garuda pada lehernya terdapat sisik yang berjumlah 17, terdapat jengger dan jambul berjumlah 8, bulu telinga yang berjumlah 4, bingkai gambar kepala Burung Garuda persegi 5, yang menyimbolkan tanggal kemerdekaan Indonesia, 17-8-45.
- ✓ Di atasnya bertuliskan PARTAI berwarna hitam, di bawahnya bertuliskan GERINDRA berwarna merah dengan tepi tulisan berwarna hitam, di bawahnya lagi tulisan GERAKAN INDONESIA RAYA berwarna hitam.

### 1.6. Wewenang Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

- a) Membuat Program Kerja tahunan dan Peraturan Partai Gerindra di tingkat Nasional berdasarkan kebijakan Ketua Dewan Pembina dan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah

Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa dan Rapat Pimpinan Nasional.

- b) Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah yang menetapkan calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- c) Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan keputusan Musyawarah Cabang yang menetapkan calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- d) Menetapkan komposisi dan personalia Pengurus Partai tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- e) Menetapkan komposisi dan personalia Dewan Penasehat Pusat dan Dewan Pakar atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- f) Menetapkan dan mengajukan bakal calon anggota legislatif DPR dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- g) Menetapkan dan mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- h) Menetapkan dan mengajukan calon Menteri, Duta Besar, jabatan dalam pemerintahan dan jabatan publik lainnya dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- i) Memberi rekomendasi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- j) Memberi rekomendasi calon Bupati/Walikota dan calon Wakil Bupati/Wakil Walikota dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

- k) Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah.
- l) Memberikan penghargaan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- m) Memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, berdasarkan putusan sidang Majelis Etik dan Kehormatan.
- n) Menyelenggarakan Kongres.
- o) Menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- p) Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- q) Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- r) Menyelenggarakan Konferensi Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- s) Membentuk Badan dan atau Lembaga untuk tugas-tugas tertentu di tingkat Pusat dan daerah atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- t) Menjalin hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Badan atau Lembaga lain dan Partai Politik atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- u) Menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa
- v) Membentuk Organisasi Sayap atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- w) Melaksanakan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPR dan DPRD sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- x) Melaksanakan pergantian calon terpilih anggota DPR dan DPRD sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- y) Memberhentikan Pengurus yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah partai di tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
- z) Memberhentikan Anggota Partai yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah Partai.

### 1.7. Ikrar dan Jati Diri Kader Partai

#### Ikrar Kader Partai

- 1) Siap sedia melanjutkan perjuangan pendiri bangsa untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.
- 2) Siap sedia membela Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- 3) Siap sedia membela kepentingan rakyat Indonesia diatas kepentingan pribadi maupun golongan.
- 4) Senantiasa setia kepada cita-cita luhur Partai.
- 5) Tunduk dan patuh kepada Ideologi dan disiplin Partai serta menjaga kehormatan, martabat dan kekompakan partai.

#### Jati Diri Kader Partai

Kami Kader Partai Gerindra adalah Patriot Pejuang Indonesia yang membela kedaulatan, kemerdekaan dan kehormatan Bangsa Indonesia. Kami dengan tulus ikhlas, dengan sukarela, dengan penuh rasa cinta tanah air dan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Ibu Pertiwi, bertekad dengan segenap jiwa dan raga kami, membela keutuhan dan kejayaan Bangsa Indonesia.

Kami Kader Partai Gerindra adalah Ksatria yang membela kebenaran, kejujuran dan keadilan. Dalam hidup dan perilaku kami sehari-hari, kami akan selalu bertindak dengan sopan, disiplin dan rendah hati. Kami pantang berbuat curang, pantang mencuri dan pantang berbuat korupsi terhadap uang Partai, uang rakyat ataupun

uang Negara. Kami juga pantang berkhianat terhadap cita cita perjuangan Partai dan cita cita perjuangan Bangsa Indonesia. Kami akan menghormati orang tua, sesepuh dan semua generasi pendahulu yang telah memberikan pengorbanan untuk menjadikan kami sebagai Bangsa merdeka.

Kami Kader Partai Gerindra terjun ke kancah politik untuk membela kaum yang lemah, kaum yang miskin dan kaum yang tertindas. Kami akan berjuang untuk membangun suatu bangsa yang terhormat, Bangsa yang adil dan makmur, Bangsa yang disegani oleh bangsa bangsa lain karena keadilan dan kesejahteraan rakyatnya.

Kami Kader Partai Gerindra bertekad membangun suatu masyarakat Bhineka Tunggal Ika yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia apapun sukunya, apapun agamanya, apapun rasnya dan apapun latar belakang sosialnya.

Kami Kader Partai Gerindra adalah pembela tanah air Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai perjuangan Kita.

#### 1.8. Sumber Keuangan Partai Gerindra

Sumber-sumber keuangan Partai Gerindra terdiri atas :

- a. Iuran wajib Anggota Partai.
- b. Iuran sukarela Anggota Partai
- c. Iuran Pengurus Partai.
- d. Sumbangan perorangan bukan Anggota Partai paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- e. Sumbangan perusahaan dan atau badan usaha, paling banyak senilai Rp.7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

- f. Sumbangan penghasilan sebagai Anggota DPR dan DPRD dari Partai Gerindra sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penghasilan yang diterima adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap anggota DPR dan DPRD.
- g. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Belanja Daerah (APBN / APBD).

## **2. DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan**

2.1. Sekretariat DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan menyewa ruko yang beralamat di Jalan Sulawesi 204, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan 51113.

2.2. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Pekalongan Masa Bakti 2011-2016

- |           |   |   |                        |
|-----------|---|---|------------------------|
| <b>1.</b> | Ketua   | : | H. Ribut Kalimantanoro |
|           | a. Wakil Ketua Bid. Organisasi,<br>Kaderisasi dan Keanggotaan | : | R.A. Hartomo           |
|           | b. Wakil Ketua Bid. Pemberdayaan<br>Perempuan                 | : | Fitriyah Sungkar       |
|           | c. Wakil Ketua Bid. Nelayan dan Kelautan                      | : | Bambang Sunanto        |
|           | d. Wakil Ketua Bid. Pendidikan dan<br>Kesejahteraan Rakyat    | : | Ny. Anyta Arianti      |
|           | e. Wakil Ketua Bid. Usaha Kecil, dan<br>Menengah              | : | Tri Ning Anggoro Warni |
|           | f. Wakil Ketua Bid. Koperasi                                  | : | Sri Wahyuni P.         |
|           | g. Wakil Ketua Bid. Kepemudaan                                | : | Sofyan Hadi            |
|           | h. Wakil Ketua Bid. Pemenangan Pemilu                         | : | Imam Adi Purnomo       |
|           | i. Wakil Ketua Bid. Keagamaan                                 | : | M. Arif Hidayatullah   |
|           | j. Wakil Ketua Bid. Kelengkapan Logistik                      | : | Gunawan                |
| <b>2.</b> | Sekretaris  | : | Hanafi                 |
|           | a. Wakil Sekretaris   | : | Cahyo Dwinanto, S.Pi.  |
|           | b. Wakil Sekretaris   | : | Abdul Barok, SE.       |
| <b>3.</b> | Bendahara   | : | Riana Setyawati, SH.   |
|           | a. Wakil Bendahara  | : | H. Ading Bisri         |
|           | b. Wakil Bendahara  | : | Nur Fatehah            |

*Sumber : Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan*

### 2.3. Wewenang Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

- a) Membuat Program Kerja tahunan berdasarkan kebijakan Ketua Dewan Pembina dan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan, baik tingkat Nasional dan Daerah serta Cabang.
- b) Menetapkan dan mengesahkan komposisi dan susunan personalia pengurus Pimpinan Anak Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
- c) Memberikan persetujuan atas penetapan komposisi dan susunan personalia pengurus Pimpinan Ranting.
- d) Menetapkan dan mengajukan calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Gerindra atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Dewan Pembina.
- e) Mengajukan calon Bupati/Walikota dan calon Wakilnya dari Partai Gerindra ke Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah.
- f) Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Anak Cabang.
- g) Menyelenggarakan Musyawarah Cabang.
- h) Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Cabang.
- i) Menyelenggarakan Rapat Kerja Cabang.
- j) Menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.
- k) Menetapkan pengisian lowongan antar waktu pengurus Pimpinan Anak Cabang.
- l) Mengajukan usul pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Kabupaten/Kota ke Dewan Pimpinan Pusat, sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- m) Melaksanakan pembinaan Organisasi Sayap Partai Gerindra di Kabupaten/Kota.

#### 2.4. Kewajiban DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan

- a) Melaksanakan Program Kerja tahunan dan semua ketentuan Partai Gerindra di Tingkat Kabupaten / Kota sesuai dengan kebijakan Ketua Dewan Pembina dan AD-ART Partai, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan baik ditingkat Nasional dan Daerah serta Cabang.
- b) Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa.

#### 2.5. Organisasi Sayap Partai Gerindra

Partai Gerindra memiliki organisasi sayap untuk dapat mengakomodasi aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. Berikut ini adalah organisasi sayap Partai Gerindra saat ini adalah Gerakan Rakyat Dukung Prabowo (Gardu Prabowo), Tunas Indonesia Raya (TIDAR), Perempuan Indonesia Raya (PIRA), Kristen Indonesia Raya (KIRA), Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA), Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya (SEGARA), Persatuan Tionghoa Indonesia Raya (PETIR), Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA), Kesehatan Indonesia Raya (KESIRA), Barisan Garuda Muda (BGM) dan Garuda Muda Indonesia (GMI). Organisasi sayap sebagai sumber anggota yang dibentuk oleh Partai Gerindra berperan sebagai pendukung partai untuk membantu perjuangan Partai Gerindra melalui pelaksanaan program partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## 2.6. Hubungan dan Kerjasama dengan Ormas, Partai Politik, Badan atau Lembaga Lain

### ✓ Dengan Organisasi Kemasyarakatan

Hubungan dan kerjasama Partai Gerindra dengan Organisasi Kemasyarakatan yang membantu perjuangan Partai Gerindra dan dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang menyalurkan aspirasinya kepada Partai Gerindra dilakukan dalam bentuk program dan atau kegiatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk kepentingan masyarakat.

### ✓ Dengan Partai Politik

(1) Hubungan dan kerjasama dengan Partai Politik lainnya, dapat dilakukan dengan Partai Politik mana saja yang azas, jati diri dan wataknya sama atau tidak bertentangan dengan azas, jati diri dan watak Partai Gerindra. Hubungan dan Kerjasama dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.

(2) Partai Gerindra dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Partai Politik lainnya dalam bentuk koalisi untuk kepentingan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan.

### ✓ Dengan Badan atau Lembaga Lain.

Hubungan dan kerjasama Partai Gerindra dengan Badan atau Lembaga Lain dapat dilakukan dalam bentuk program dan atau kegiatan bersama untuk kepentingan masyarakat.

## 2.7. Kondisi Politik Partai Gerindra Kota Pekalongan

- ✓ Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010

Tabel 2.11. Kondisi Politik dan Perolehan Suara pada Pilkada Kota Pekalongan Tahun 2010

No.	Koalisi Partai Politik (Kursi Anggota DPRD)	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	- Partai Golkar (8) - PKS	dr. H.M. Basyir Ahmad & H.A. Alf Arslan Djunaid, SE.	73.963 (53,08%)
2	- PDI Perjuangan (4) - PPP (4) - PKB (3) - PAN (5) - Partai Gerindra (1) - Partai Demokrat (2) - PKNU (1)	H. Abu Almafachir & H. Masrof, SH.	56.854 (40,80%)
3	Independen (Perorangan)	Supriyadi, SH. M.Pd. & Drs. H. Abd. Kholiq	8.515 (6,11%)
JUMLAH			139.332 (100%)

Sumber : KPU Kota Pekalongan

- ✓ Pemilu Legislatif DPRD Kota Pekalongan Tahun 2014

Tabel 2.12. Perolehan Suara dan Kursi DPRD Kota Pekalongan dari Partai Gerindra pada Hasil Pemilu Legislatif 2014

No.	Daerah Pemilihan (Dapil)	Jumlah Suara Sah	Perolehan Kursi
1	Kota Pekalongan 1	3.033	1
2	Kota Pekalongan 2	3.610	1
3	Kota Pekalongan 3	3.656	1
4	Kota Pekalongan 4	1.296	-
JUMLAH		11.595	3

Sumber : KPU Kota Pekalongan